



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el bkpsdm@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR: 06 Tahun 2025**

TENTANG

**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, setiap Perangkat Daerah perlu membentuk Struktur Pengelolaan Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Struktur Pengelolaan Risiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2029 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Anambas Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 633 Tahun 2024 tentang Struktur Pengelolaan Risiko.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2026.
- KESATU** : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagaimana pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Perangkat Daerah:
 - a) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai ketua;

- b) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c) Seluruh Kepala Bidang sebagai anggota.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Kepala Bidang / Kepala Sub Bagian
- a) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan seluruh Kepala Bidang selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas selaku koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c) Pejabat Fungsional/ Struktural/ Pelaksana sebagai anggota.

- KETIGA** : Struktur Pengelolaan Risiko pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko berwenang mengordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu:
 - 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 - 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - 3. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
 - 4. Melakukan Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 - 2. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 - 3. Menyenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning indikator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
 - 4. Menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - 5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko;

6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

- KEEMPAT : Struktur Pengelolaan Risiko di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada tanggal : 24 November 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Utama Muda/IV.c
196801262000032002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kepulauan
Anambas
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 24 November 2025

**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026**

No	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dra. Nurgayah, M.A	Penanggung Jawab
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO			
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rina Sapariyani, ST, M.Si.	Koordinator
C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PERANGKAT DAERAH			
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dra. Nurgayah, M.A	Ketua
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rina Sapariyani, ST, M.Si.	Koordinator merangkap anggota
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Aan Nugraha, S.E.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Doni Warjianto, S.E	Anggota
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Eva Nilasari, SE	Anggota
D. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT KEPALA BIDANG / KEPALA SUB BAGIAN			
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rina Sapariyani, ST, M.Si.	Ketua

2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Aan Nugraha, S.E.	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Doni Warjianto, S.E	Ketua
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Eva Nilasari, SE	Ketua
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Li Cuan, S.E.	Koordinator merangkap anggota
6.	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Wisnu Hardiyanto, S.M., M.M.	Koordinator merangkap anggota
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	Erwin, S.I.P	Anggota
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	Mega Kumala Sari, SP	Anggota
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	Ewin Sanri Putra Hutapea, S.Kom	Anggota
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	An'umillah Wahyu Nuri Azizah, S.Psi	Anggota
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda	Karyawari, S.AP	Anggota
12.	Penata Layanan Operasional	Rosiana, S.Pd	Anggota

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Dra. Nurgayah, M.A
Pembina Utama Muda/IV.c
196801262000032002

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nama OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang Dinilai : RPJMD 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
			Kategori Risiko	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n	o = m x n	p
1	Tujuan:													
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Predikat AKIP	Risiko Lainnya	Ketidaktepatan dalam melakukan evaluasi kinerja BKPSDM yang berpengaruh pada penurunan nilai akuntabilitas kinerja instansi	BKPSDM	kurangnya pemahaman pegawai terhadap sistem akuntabilitas kinerja, tidak adanya sistem perencanaan dan manajemen kinerja yang terpadu	Method	C	efektivitas pengelolaan kinerja menurun	INSTANSI	2	1	2	review triwulanan capaian kinerja
1	Sasaran:													
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Risiko Lainnya	Ketidaktepatan dalam melakukan perencanaan BKPSDM yang dapat mempengaruhi pada program kerja	BKPSDM	Keterbatasan SDM perencanaan dan sinkronisasi perencanaan-anggaran-capaian belum optimal	Man	C	Penurunan nilai SAKIP	INSTANSI	2	1	2	Capacity building penyusunan rencana kinerja dan integrasi perencanaan-anggaran
1	Tujuan:													
	Mewujudkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Risiko Lainnya	Ketidaktercapaian sasaran dan target peningkatan Indeks Profesionalitas ASN dan Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan layanan kepegawaian	BKPSDM	Terbatasnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan yang rendah	Money	C	Penurunan kualitas kinerja ASN dan kepercayaan publik	INSTANSI	2	2	4	Menyusun rencana Pengembangan Kompetensi berbasis training need analysis dan individual development plan, alokasi anggaran khusus Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi serta implementasi monitoring peserta dan evaluasi pasca-diklat
1	Sasaran:													
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Yang Profesional	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Risiko Kepatuhan	Ketidaktepatan atau ketidakperuhiannya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN pada seluruh proses kepegawaian, yang berpotensi menurunkan konsistensi, integritas dan objektivitas tata kelola	BKPSDM	Ketidaksinkronan data dan informasi antar-unit, sehingga penerapan standar manajemen ASN tidak sepenuhnya seragam.	Man	C	Menurunnya kualitas pelayanan publik akibat tata kelola manajemen ASN yang tidak konsisten dengan NSPK nasional	INSTANSI	3	2	6	Monitoring-evaluasi berkala terhadap pemenuhan standar NSPK pada seluruh siklus manajemen ASN mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, kinerja, mutasi, promosi, hingga pensiun.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra.

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis.

Kolom d diisi dengan uraian kategori risiko (dropdown list)

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom f diisi dengan Kode risiko, akan terisi otomatis jika kolom d dan e terisi.

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material.

Kolom i diisi dengan kategori penyebab risiko yaitu Man, Money, Method, Machine , dan Material dan atau eksternal organisasi.

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kerugian Negara, Penurunan Reputasi, Penurunan Kinerja, Gangguan terhadap Layanan Organisasi, dan Tuntutan

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom m diisi dengan skala dampak sesuai dengan sheet level dampak dan kemungkinan

Kolom n diisi dengan skala Kemungkinan sesuai dengan sheet level dampak dan kemungkinan

Kolom o diisi dengan nilai risiko hasil perkalian kemungkinan dikali dampak

Kolom p diisi dengan rencana tingkat pengendalian

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nama OPD : **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
 Tahun Penilaian : 2026
 Periode yang Dinilai : RPJMD 2025-2029
 Urusan Pemerintahan :

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	
			Tahap	Kategori Risiko	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Kategori Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q = o x p	r
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (IKM)	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Proses pelaksanaan atau isi dokumen tidak sesuai dengan yang akan dilaksanakan	Sekretariat	Kurangnya koordinasi antar unit kerja	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	2	2	4	Menyusun perencanaan dan jadwal kerja terintegrasi	
1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Sekretariat	Kurangnya pemahaman ASN dalam menyusun dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Man	C	Penyelesaian dokumen sering terlambat	BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	2	4	Memberikan pengembangan kompetensi	
a	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Dokumen tidak sesuai standar	Sekretariat	Kurangnya pemahaman ASN dalam menelaah dokumen dan regulasi	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan reputasi	2	2	4	Memberikan coaching dan mentoring	
b	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Kepatuhan	Laporan evaluasi tidak lengkap atau tidak tepat waktu	Sekretariat	Keterbatasan SDM dan sistem pelaporan	Man	C	Penyusunan laporan evaluasi menjadi terlambat	BKPSDM	Penurunan kinerja	2	2	4	Menetapkan SOP dan Monitoring secara berkala	
c	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Data statistik tidak akurat	Sekretariat	Kurangnya validasi dan verifikasi data	Method	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penerapan standar validasi dan audit data	
d	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah	Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Data tidak terkumpul secara menyeluruh	Sekretariat	Minimnya partisipasi OPD	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Sosialisasi pentingnya data dan penugasan khusus pengumpulan	
2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan	Sekretariat	Lemahnya pengawasan internal	Man	C	Administrasi keuangan menjadi tidak lengkap	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Audit internal rutin dan pelatihan pengelolaan keuangan	
a	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pertanggungjawaban	Risiko Pembiayaan	Kurangnya anggaran dalam proses belanja pegawai	Sekretariat	Salah perhitungan dalam menyusun anggaran	Man	C	Proses belanja pegawai tidak dapat dilaksanakan	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	Membuat telaahan staf penambahan anggaran	
b	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Dokumen tidak lengkap atau tidak sah	Sekretariat	Ketidaktahuan ASN dalam proses pertanggungjawaban	Man	C	Belanja tidak dapat diproses	BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	1	1	Membuat SOP dan SP	
3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan pengelolaan kepegawaian	Sekretariat	Beban kerja tinggi dan kurangnya SDM	Man	C	Hasil kerja tidak maksimal	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penambahan staf dan digitalisasi seluruh proses kepegawaian	
a	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Barang tidak sesuai spesifikasi	Sekretariat	Kurangnya kontrol kualitas	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Kerugian negara	1	1	1	Pengadaan berbasis e-katalog dan inspeksi barang	
b	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Pembiayaan	Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan sesuai tugas	Sekretariat	Minimnya anggaran	Money	C	Kompetensi ASN tidak terpenuhi	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Peningkatan kompetensi melalui CMB (coaching, mentoring, dan belajar mandiri)	
4	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan operasional atau rutinitas perkantoran	Sekretariat	Perencanaan kebutuhan tidak akurat	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan	
a	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Instalasi tidak berfungsi optimal	Sekretariat	Spesifikasi teknis tidak sesuai kebutuhan	Method	C	Pencahayaan Kantor menjadi kurang maksimal	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Evaluasi pengadaan barang	
b	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Peralatan tidak mencukupi kebutuhan kerja	Sekretariat	Perencanaan kebutuhan tidak akurat	Man	C	Tidak maksimal dalam bekerja	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	Penerapan sistem manajemen logistik dan buffer stock	

c	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Barang tidak tersedia saat dibutuhkan	Sekretariat	Keterlambatan pengadaan	Man	C	Rutinitas perkantoran menjadi terganggu	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	Evaluasi pengadaan
d	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Kekurangan logistik operasional	Sekretariat	Stok tidak dikelola dengan baik	Man	C	Rutinitas perkantoran menjadi terganggu	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	Digitalisasi Manajemen Stok
e	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Kualitas cetakan tidak sesuai standar	Sekretariat	Kurangnya kontrol kualitas vendor	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan reputasi	1	1	1	Pengawasan ketat terhadap vendor
f	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Ketidaksiapan fasilitas saat kunjungan	Sekretariat	Koordinasi antar unit tidak optimal	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Koordinasi intensif dengan unit yang bertanggungjawab
g	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Rapat dan konsultasi tidak efektif atau tidak terdokumentasi	Sekretariat	Tidak ada notulen dan laporan bersifat normatif atau kurang spesifik	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	tersedianya notulen dan komunikasi intensif dengan unit yang terlibat
5	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Barang tidak sesuai spesifikasi atau terlambat	Sekretariat	Kurangnya pengawasan vendor	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	pengawasan ketat pelaksanaan
a	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Barang tidak sesuai spesifikasi atau terlambat	Sekretariat	Kurangnya pengawasan vendor	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	1	1	Pengawasan ketat pelaksanaan
b	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Mesin tidak berfungsi optimal	Sekretariat	Tidak ada uji kelayakan sebelum pembelian	Method	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	1	1	Melaksanakan uji kelayakan sebelum pembelian
c	Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan dalam pembayaran	Sekretariat	Perencanaan anggaran dan waktu tidak realistis	Money	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Komunikasi intensif dengan TAPD
6	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan operasional	Sekretariat	Proses distribusi tidak efisien	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penyusunan SOP dan pengawasan
a	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan pengiriman surat penting	Sekretariat	Proses distribusi tidak efisien	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penyusunan SOP dan pengawasan
b	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pertanggungjawaban	Risiko Lainnya	Gangguan layanan komunikasi atau listrik	Sekretariat	Keterlambatan pembayaran tagihan	Money	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Proses pembayaran dipercepat
7	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Pertanggungjawaban	Risiko Operasional	Kondisi Barang sudah tidak bisa digunakan	Sekretariat	Jadwal pemeliharaan tidak rutin	Money	C	Ketersediaan barang menjadi semakin berkurang	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap barang
a	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Kendaraan rusak saat dibutuhkan	Sekretariat	Jadwal pemeliharaan tidak rutin	Money	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penyusunan SOP dan pengawasan
b	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Peralatan rusak dan tidak bisa digunakan	Sekretariat	Tidak ada SOP pemeliharaan	Method	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	BKPSDM	Penurunan kinerja	1	2	2	Penyusunan SOP dan pengawasan
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Proses Perencanaan tidak berbasis dengan data yang akurat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kurangnya pemahaman teknis	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Koordinasi intensif dengan instansi pusat dan perencanaan formasi berbasis kebutuhan
1	Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kuota formasi ASN yang ditetapkan	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Hasil seleksi yang tidak memenuhi persyaratan	Man	C	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN tidak tercapai	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DAN BKPSDM	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	4	8	Menyampaikan informasi lebih intensif melalui media sosial kepada calon pelamar

a	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Dokumen tidak lengkap	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kurangnya pemahaman teknis	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Pelatihan teknis dan checklist dokumen wajib
b	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pertanggungjawaban	Risiko Lainnya	Proses pemberhentian tidak sesuai prosedur	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Minimnya pemahaman regulasi	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Sosialisasi regulasi dan supervisi pemberhentian
c	Sub Kegiatan: Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Kepatuhan	Lembaga tidak difasilitasi tepat waktu	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi antar unit tidak berjalan dan minimnya anggaran	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Penjadwalan kegiatan dan monitoring pelaksanaan
d	Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pertanggungjawaban	Risiko Operasional	Data kepegawaian tidak akurat	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sistem belum terintegrasi sepenuhnya dan pemutakhiran data belum dilakukan oleh seluruh ASN	Man	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Komunikasi intensif dengan tim IT dan validasi data berkala
2	Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pemenuhan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Belum optimalnya penempatan PNS pada jabatan administrasi (jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana) dan Jabatan Fungsional)	Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Penempatan PNS pada Jabatan atas rekomendasi Tim Penilai Kinerja, belum terpenuhinya persyaratan menduduki jabatan	Method	C	Kurang optimalnya Kinerja Organisasi	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	2	4	Penerapan Manajemen Talenta, perlunya dilakukan optimalisasi terhadap Tim Administrasi Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil
a	Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Belum optimalnya penempatan PNS pada jabatan administrasi (jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana) dan Jabatan Fungsional)	Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Penempatan PNS pada Jabatan atas rekomendasi Tim Penilai Kinerja, belum terpenuhinya persyaratan menduduki jabatan	Method	C	Kurang optimalnya Kinerja Organisasi	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	2	4	Perlunya dilakukan optimalisasi terhadap Tim Administrasi Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil terhadap verifikasi pemenuhan persyaratan PNS yang akan menduduki
b	Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pelaksanaan	Risiko Operasional	Terhambatnya proses Kenaikan Pangkat PNS sehingga tidak sesuai dengan periode seharusnya ybs bisa naik pangkat	Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Adanya berkas yang diusulkan tidak sesuai dengan dokumen yang diminta oleh BKN sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut pada PNS, adanya perubahan format atau fitur aplikasi tanpa sosialisasi yang cukup	Man	C	Tertundanya Kenaikan Pangkat PNS, Adanya ketidakpuasan PNS yang mengusulkan Kenaikan Pangkat, Ketidakterpenuhinya Target Kenaikan Pangkat Tahunan	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	3	6	Meminimalisir adanya Berkas Tidak Lengkap/ Tidak Memenuhi Syarat, Mengoptimalkan tim administrasi Kenaikan Pangkat, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perubahan format atau fitur aplikasi secara rutin (tatap muka/online)
3	Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase jumlah PNS yang menempuh pendidikan lanjutan	Perencanaan	Risiko Lainnya	ASN tidak dapat mengikuti pendidikan lanjutan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Minimnya anggaran dan motivasi	Money	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	1	2	2	Penyusunan rencana pengembangan dan insentif pelatihan
a	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Perencanaan	Risiko Pembiayaan	Keterbatasan anggaran pendidikan lanjutan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Keterbatasan APBD; prioritas belanja lain	Money	C	Banyak ASN tidak bisa mengikuti studi lanjut	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Optimalisasi beasiswa eksternal; kerja sama pembiayaan dengan perguruan tinggi; perencanaan anggaran lebih
			Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Ketidaksesuaian program studi dengan kebutuhan organisasi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Tidak adanya pemetaan kompetensi; komunikasi lemah dengan OPD pengguna	Method	C	Pendidikan tidak relevan dengan jabatan; pemborosan anggaran	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Pemetaan kebutuhan kompetensi; validasi program studi lebih ketat
			Pelaksanaan	Risiko Startegis	Tidak adanya kerja sama formal dengan perguruan tinggi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Belum dilakukan peninjauan	Method		ASN kesulitan memperoleh akses program studi prioritas	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Menyusun MoU/MoA; membangun hubungan dengan kampus strategis
			Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	ASN tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Beban tugas tinggi; masalah keluarga; kemampuan akademik rendah	Man	UC	Keterlambatan penyelesaian; tidak optimalnya capaian indikator	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	2	6	Monitoring berkala; dukungan pembinaan akademik; fleksibilitas penugasan
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Kepatuhan	Risiko ASN tidak kembali atau tidak berkomitmen selesai pendidikan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Lemahnya pengawasan; tidak tegasnya mekanisme ikatan dinas	Man	UC	Kehilangan SDM kompeten	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	4	2	8	Penegakan strict ikatan dinas; pengawasan dan evaluasi rutin

4	Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang memiliki predikat kinerja minimal BAIK	Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Lainnya	Penilaian tidak objektif	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Tidak ada indikator kinerja jelas	Method	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Penyusunan indikator kinerja dan pelatihan penilai
a	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Keterlambatan penyampaian dokumen penilaian dari perangkat daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Kurangnya pemahaman terhadap jadwal	Method	C	Dokumen hasil terlambat disusun; pengolahan nilai tidak sesuai timeline	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Menetapkan SOP batas waktu; pengiriman reminder berjenjang; pemantauan progres mingguan
			Pelaksanaan	Risiko Operasional	Gangguan aplikasi e-Kinerja atau ASN DIGITAL	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Infrastruktur tidak stabil; pemeliharaan sistem tidak terjadwal	Machine	C	Data penilaian gagal diinput; keterlambatan penyusunan laporan	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Koordinasi dengan BKN; penyediaan jalur input manual sementara; backup data berkala
			Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Penilaian kinerja tidak objektif	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Kurangnya kompetensi penilai; konflik kepentingan	Man	C	Hasil evaluasi tidak akurat; menurunkan kepercayaan ASN	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	4	12	Pelatihan dan sosialisasi berkala bagi penilai
			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Penilaian tidak berbasis bukti kinerja	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Pejabat penilai tidak memperhatikan data pendukung lengkap	Man	C	Potensi keberatan ASN; kualitas evaluasi turun	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	4	12	Mewajibkan pejabat penilai memperhatikan unggahan evidence/bukti dukung
b	Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Ketidaktepatan identifikasi ASN yang perlu pembinaan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Data kehadiran tidak akurat; laporan OPD tidak lengkap	Man	C	ASN yang melanggar tidak terbina; pelanggaran berulang Pembinaan tidak efektif; tingkat pelanggaran meningkat	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	4	12	Penerapan reward and punishment dan monitoring kehadiran
			Pelaksanaan	Risiko Operasional	Keterlambatan proses penanganan pelanggaran disiplin	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Administrasi lambat; koordinasi antar-OPD tidak optimal	Method	C	Pembinaan tidak efektif; tingkat pelanggaran meningkat	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Percepatan alur administrasi
			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pemahaman OPD terkait prosedur pembinaan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Minim sosialisasi	Method	C	Pembinaan tidak konsisten; terjadi salah prosedur	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Sosialisasi regulasi; penyediaan pedoman teknis;
			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Dokumentasi pembinaan tidak lengkap	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Arsip tidak tertata	Method	C	Data pembinaan tidak dapat dipertanggungjawabkan	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Penetapan format dokumentasi; digitalisasi arsip;
			Pelaksanaan	Risiko Operasional	ASN tidak kooperatif saat proses pembinaan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Ketidaktahuan aturan; resistensi perubahan perilaku	Eksternal	C	Pembinaan tidak efektif; potensi pelanggaran ulang	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	3	9	Pendekatan pembinaan persuasif; konseling ASN; penguatan komunikasi OPD
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian penanganan kasus dengan aturan disiplin	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Penafsirannya berbeda; kurang pelatihan bagi pejabat terkait	Method	C	Potensi penyimpangan; sengketa disiplin	INSTANSI		3	3	9	Pelatihan penegakan disiplin; supervisi dan review berjenjang
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Pembiayaan	Minimnya monitoring dan evaluasi pembinaan; resiko anggaran (pengurangan atau keterlambatan pencairan)	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Penyesuaian anggaran; mekanisme pencairan lambat	Money	C	Tidak diketahui efektivitas pembinaan	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	3	9	Penguatan sistem monitoring; dashboard pengawasan disiplin; koordinasi intensif dengan BPKPD; penjadwalan ulang
			Penatausahaan	Risiko Kepatuhan	Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen kasus disiplin	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Arsip manual; tidak ada backup	Method	C	Gangguan penyusunan laporan; sengketa hukum	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	1	3	Digitalisasi dan backup; penyimpanan berbasis cloud
			Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya dukungan OPD dalam melaksanakan pembinaan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Rendahnya komitmen pimpinan PD dan atasan langsung	Man	C	Pelaksanaan pembinaan tidak komprehensif	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	4	8	Penegakan reward–punishment bagi OPD
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Pembiayaan	Keterbatasan anggaran pembinaan dan pengawasan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Refocusing; penyesuaian anggaran	Money	UC	Kegiatan pembinaan tidak optimal	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	4	12	Prioritas anggaran wajib
iii.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Perencanaan	Risiko Lainnya	Keterbatasan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Belum tersusunya Road Map Pengembangan Kompetensi ASN	Money	C	Penurunan reputasi pemerintah daerah dan nama baik perangkat daerah	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	2	2	4	Penyusunan roadmap sertifikasi dan pelatihan
1	Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN setiap tahun	Perencanaan	Risiko Operasional	Ketidaksesuaian pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan riil perangkat daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Data kompetensi tidak mutakhir; kurangnya koordinasi dengan OPD	Method	C	Pelatihan tidak tepat sasaran; rendahnya peningkatan kompetensi;	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	4	3	12	Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan berbasis data; koordinasi rutin dengan OPD; pembaruan data profil ASN

			Pelaksanaan	Risiko Operasional	Keterbatasan kuota pelatihan dari Lembaga Pelatihan Pemerintah	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Keterbatasan Lembaga Diklat; tingginya permintaan nasional	Eksternal	C	ASN tidak mendapatkan pelatihan sesuai target tahunan	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	2	6	Penjadwalan ulang; penggunaan skema pelatihan blended; kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan
			Penatausahaan	Risiko Operasional	Keterlambatan proses administrasi pendaftaran dan penugasan pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	SDM administrasi terbatas; proses manual	Man	C	ASN gagal mengikuti pelatihan; penurunan angka pemenuhan sertifikasi	INSTANSI	Penurunan kinerja	2	2	4	Digitalisasi proses pendaftaran; penyusunan SOP; penetapan PIC pada setiap jenjang
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Pembiayaan	Kualitas pelatihan tidak memenuhi standar kompetensi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Lembaga pelatihan tidak terakreditasi; materi tidak sesuai kebutuhan	Man	C	Kompetensi ASN tidak meningkat; ketidaksesuaian output dengan indikator	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	4	1	4	Verifikasi lembaga pelatihan; evaluasi pasca pelatihan; penyusunan standar konten pelatihan
			Pelaksanaan	Risiko Lainnya	Kurangnya partisipasi ASN dalam mengikuti pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Beban kerja tinggi; kurangnya motivasi; ketidaksesuaian jadwal	Man	UC	Target persentase pengembangan kompetensi tidak tercapai	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	4	12	Sosialisasi pentingnya pengembangan kompetensi; integrasi pelatihan dalam penilaian kinerja; penjadwalan fleksibel
			Pelaksanaan	Risiko SPBE	Kendala teknis pada penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Infrastruktur internet terbatas; kurangnya perangkat	Machine	UC	Pelatihan terganggu atau tidak dapat diikuti	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	3	9	Penyediaan sarana prasarana; dukungan teknis; penggunaan platform pembelajaran yang stabil
			Pertanggungjawaban	Risiko Operasional	Ketidaklengkapan dokumen hasil pelatihan untuk arsip dan pelaporan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Pengumpulan dokumen manual; kurangnya disiplin peserta	Method	C	Keterlambatan pelaporan; ketidakakuratan data sertifikasi	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	2	6	Digitalisasi pengumpulan dokumen; penetapan batas waktu; monitoring ketat
			Pelaksanaan	Risiko Kepatuhan	Perubahan regulasi terkait standar kompetensi ASN	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Kebijakan pusat berubah; belum ada pedoman teknis	Eksternal	C	Program pelatihan tidak sesuai regulasi terbaru	INSTANSI	Tuntutan hukum	4	1	4	Monitoring regulasi; penyesuaian cepat kurikulum pelatihan
			Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Startegis	Tidak optimalnya monitoring dan evaluasi pascapelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	SDM Monev terbatas; belum ada instrumen baku	Method	C	Dampak pelatihan tidak terukur; kurangnya peningkatan kinerja ASN	INSTANSI	Penurunan reputasi	4	1	4	Penyusunan instrumen Monev; penggunaan 360-degree feedback; integrasi hasil monev dalam penilaian kinerja
			Pelaksanaan	Risiko Pembiayaan	Risiko anggaran (pengurangan atau keterlambatan pencairan)	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Penyesuaian anggaran; mekanisme pencairan lambat	Money	C	Pelatihan tertunda; tidak tercapainya target tahunan	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	4	12	Penyusunan prioritas pelatihan; koordinasi intensif dengan BPKPD; penjadwalan ulang kegiatan
			Pelaksanaan	Risiko Startegis	Ketidaksesuaian jumlah dan kompetensi widyaiswara/pengajar	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Ketersediaan terbatas; jadwal bentrok	Money	C	Materi tidak tersampaikan optimal; penurunan kualitas pelatihan	INSTANSI	Penurunan kinerja	3	3	9	Kerjasama lintas lembaga; penggunaan pengajar eksternal tersertifikasi
a	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pemantauan dan Evaluasi	Risiko Startegis	Data hasil pelatihan tidak terkumpul lengkap Keterlambatan penyusunan laporan kegiatan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Peserta terlambat mengirim dokumen; dokumentasi tidak standar	Man	C	Laporan tidak lengkap; revisi berulang	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Evaluasi efektivitas pelatihan dan pemetaan kebutuhan
			Penatausahaan	Risiko Operasional	Keterlambatan penyusunan laporan kegiatan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	SDM penyusun terbatas; beban kerja tinggi; proses manual	Man	C	Laporan terlambat disampaikan; memengaruhi penilaian kinerja unit	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	2	6	Penjadwalan internal; pembagian tugas; penggunaan template baku
			Pelaksanaan	Risiko Startegis	Kurangnya bukti fisik dan digital pelaksanaan pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Dokumentasi tidak dilakukan sistematis; alat rekam tidak tersedia	Machine	C	Validitas laporan dipertanyakan; risiko audit	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	2	6	Penugasan PIC dokumentasi; penyediaan perangkat; folder penyimpanan terstruktur
			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian format laporan dengan standar pemerintah	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Tidak adanya pedoman baku; revisi kebijakan tiba-tiba	Eksternal	UC	Laporan dikembalikan untuk perbaikan; keterlambatan pengesahan	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	2	6	Penyelarasan dengan regulasi terbaru; penggunaan template terkini
			Pertanggungjawaban	Risiko Startegis	Kurangnya koordinasi dengan lembaga penyelenggara pelatihan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Informasi tidak diperoleh tepat waktu; komunikasi tidak intens		C	Keterlambatan rekap laporan; data tidak akurat	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Komunikasi rutin; MoU teknis; penetapan focal point
			Pelaksanaan	Risiko Operasional	Perubahan jadwal pelatihan yang tidak terantisipasi	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Kebijakan lembaga pelatihan berubah; perubahan anggaran	Eksternal	C	Penyusunan laporan tidak tepat waktu	INSTANSI	Gangguan terhadap layanan organisasi	3	2	6	Kontinjensi jadwal; pembaruan rencana kerja berkala
			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Risiko kehilangan atau kerusakan dokumen arsip	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	Penyimpanan tidak teratur; tidak ada backup	Method	C	Data kegiatan hilang; laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	2	6	Digitalisasi arsip; penyimpanan cloud; SOP pengarsipan

			Pertanggungjawaban	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kemampuan teknis penyusun laporan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan	ASN belum dilatih; tidak familiar dengan analisis data	Man	C	Laporan kurang berkualitas; kurang analitis	INSTANSI	Penurunan reputasi	2	4	8	Pelatihan penulisan laporan; bimbingan teknis; review berjenjang
			Pertanggungjawaban	Risiko Operasional	Risiko anggaran berdampak pada penyusunan laporan	Bidang Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Penyesuaian anggaran; keterlambatan pencairan	Money	C	Laporan tidak dapat disusun tepat waktu	INSTANSI	Penurunan reputasi	3	4	12	Prioritas penggunaan anggaran; koordinasi dengan BPKPD

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD.

Kolom c diisi dengan Indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan.

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan.

Kolom e diisi dengan uraian kategori risiko (dropdown list)

Kolom f diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom g diisi dengan Kode risiko, akan terisi otomatis jika kolom e dan f terisi.

Kolom h diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom i diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine , dan Material.

Kolom j diisi dengan kategori penyebab risiko yaitu Man, Money, Method, Machine , dan Material dan atau Eksternal organisasi.

Kolom k diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom l diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Kerugian Negara, Penurunan Reputasi, Penurunan Kinerja, Gangguan terhadap Layanan Organisasi, dan Tuntutan Hukum

Kolom m diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom n diisi dengan dropdown list kategori dampak

Kolom o diisi dengan skala dampak sesuai dengan sheet level dampak dan kemungkinan

Kolom p diisi dengan skala Kemungkinan sesuai dengan sheet level dampak dan kemungkinan

Kolom q diisi dengan nilai risiko hasil perkalian kemungkinan dikali dampak

Kolom r diisi dengan rencana tingkat pengendalian